

ANALISIS PERANAN PEMERINTAH PROVINSI DALAM PEMERATAAN PENDIDIKAN DASAR DI PROVINSI RIAU

Sri Maryanti

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Lancang Kuning Pekanbaru

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peranan pemerintah provinsi pemerataan pendidikan dasar di Provinsi Riau. Penelitian dilakukan di Provinsi Riau dengan mengambil satu kota dan dua kabupaten yakni Kota Pekanbaru, Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Indragiri Hulu, dalam penelitian ini digunakan analisis statistik deskriptif dan kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa peranan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam pemerataan pendidikan di kabupaten/kota yang didasarkan pada belanja provinsi untuk pendidikan perkapita meningkat didaerah yang memiliki APBD perkapita rendah serta jumlah APK, APM dan APS rata-rata mencapai angka diatas 60%.

Key words : Peranan Pemerintah, Pemerataan pendidikan

PENDAHULUAN

Tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan dasar masih sangat besar karena lebih dari 90 persen Sekolah Dasar (SD) berstatus sebagai milik pemerintah. Untuk itu, pemerintah pusat dan daerah dituntut untuk melakukan berbagai program pembangunan pendidikan, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Sistim Pendidikan Nasional bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat, yang mana standar pembiayaan terdiri dari biaya. Untuk pengalokasian dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tetapi dalam APBN 2007 anggaran untuk sektor pendidikan hanya 11,8 persen dimana nilai ini setara dengan Rp 90,10 triliun dari total anggaran Rp 763,6 triliun (Tempo Interaktif, 8 Januari 2007).

Untuk mengukur berhasil tidaknya pembangunan pendidikan dapat dilihat dari komponen yang telah ditetapkan dalam Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang pendidikan, antara lain kurikulum, anak didik, ketenagaan, sarana prasarana, organisasi, pembiayaan, manajemen sekolah dan peran serta masyarakat. Apalagi di era otonomi daerah seharusnya kewenangan dalam penyelenggaraan pendidikan sudah lebih efisien karena telah ada peraturan tentang pembagian wewenang dibidang pendidikan seperti dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007.

Dibeberapa daerah di Indonesia disinyalir memiliki pendapatan perkapita yang tinggi malah tidak merasakan dampak dari pembangunan pendidikan adalah Desa Keladi Kecamatan Tanah putih kabupaten Rokan Hillir. Anggaran penerimaan Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2006 berjumlah 1.411.977.312.000 rupiah, dana perimbangan memberikan kontribusi terbesar yaitu 1.352.940.049.000 rupiah, Dana Alokasi Umum 91.848.000.000 rupiah dan Dana Alokasi Khusus 58.166.000.000

Analisis Peranan Pemerintah Provinsi dalam Pemerataan Pendidikan Dasar di Provinsi Riau (Sri Maryanti)

rupiah. Namun beberapa Sekolah Dasar Negeri antara lain SDN 005 yang berada di daerah itu hanya terbuat dari kayu dengan atap Rumbia. Bangunan sekolah yang mulai lapuk dimakan usia, tidak layak jika kita sebut sekolah, hal ini semakin memperburuk perwajahan pendidikan di Riau. Sehingga tak salah jika masyarakat tak merasakan program pembangunan pendidikan yang di lakukan Pemprov Riau dan Pemkab Rohil yang konon kabarnya mempunyai dana APBD terbesar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan pemerintah provinsi dalam pemerataan pendidikan yang ada di Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.

KERANGKA TEORITIS

Pendidikan adalah salah satu investasi sumber daya manusia (SDM) yang penting. Untuk memperoleh pekerjaan yang layak dengan upah tinggi, seseorang membutuhkan keterampilan (*skill*) yang memadai. Keterampilan yang memadai dapat diperoleh melalui pendidikan. Pendidikan juga elemen penting dalam rangka memerangi kemiskinan, memberdayakan wanita, dan menyelamatkan anak-anak dari berbagai upaya eksploitasi (UNICEF). Selain itu antara tingkat pendidikan dengan status kesehatan seseorang juga terdapat hubungan positif (**Education Statistic Bulletin**, 1999). Gagasan bahwa investasi pendidikan memiliki manfaat ekonomi dan sosial jangka panjang bagi individu maupun masyarakat luas sudah muncul pada masa Adam Smith bahkan sebelumnya (Center for the Study of Living Standards, 2001).

Menurut **UU No.23 tahun 2003** jenjang pendidikan formal, yaitu:

- a. Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lainnya yang sederajat.
- b. Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar yang terdiri atas pendidikan menengah umum seperti Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA) dan pendidikan menengah kejuruan seperti Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat.
- c. Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister spesialis dan doktor yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi.

Peranan Pemerintah Dalam Pendidikan

Menurut Elfindri (2001), di negara sedang berkembang pemerintah ikut berperan dalam manajemen pendidikan, hal tersebut didasari atas pertimbangan sebagai berikut:

- a) Pendidikan memerlukan pembiayaan yang berarti memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, yakni mengecap pendidikan
- b) Pendidikan merupakan *public goods*

Pembiayaan pendidikan tidak dapat hanya disandarkan melalui anggaran pemerintah yang tertuang dalam APBD/APBN. Usaha-usaha untuk mencari alternatif pembiayaan pendidikan melalui peran serta rumah tangga dan pihak swasta akan semakin diperlukan dimasa yang akan datang. Peranan pemerintah diperlihatkan dari seberapa besar subsidi yang diberikan kepada anak-anak sekolah. Peranan itu dapat juga dinyatakan dengan angka yang menunjukkan

seberapa besar proporsi pembiayaan pendidikan yang berasal dari pendapatan domestik setiap tahunnya (Elfindri,2001).

Menurut Suparmoko (2000), jika kita melihat perkembangan kegiatan pemerintah dari tahun ke tahun, tampak bahwa peranan pemerintah selalu meningkat hampir di dalam semua macam sistem perekonomian. Semakin meningkatnya peranan pemerintah ini dapat dilihat dari semakin besarnya pengeluaran pemerintah dalam proporsinya terhadap pendapatan nasional. Pengeluaran pemerintah dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah, yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah itu. Adapun indikator dari peran pemerintah adalah: Proporsi anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah provinsi untuk pembiayaan pendidikan dasar, Proporsi anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk pembiayaan pendidikan dasar, dan Item-item pembiayaan pendidikan dasar

Pemerataan Pendidikan Dari Sisi Pembiayaan Pendidikan Oleh Pemerintah

Peranan pemerintah dalam pembiayaan pendidikan karena ketidaksempurnaan pasar (*market failure*), bila penyediaan pendidikan diserahkan kepada mekanisme pasar, maka kelompok-kelompok marginal seperti keluarga miskin tidak akan mampu memikul pembiayaan dibandingkan dengan kelompok lainnya. Regulasi tentang pembiayaan akan membantu kelompok masyarakat miskin dalam pembiayaan pendidikan. Dengan demikian masyarakat miskin akan mendapatkan kesempatan yang sama dalam "meminta" pendidikan, (Elfindri, 2001) hal ini sesuai dalam pasal 31 UUD 1945 yaitu: "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan (Pasal 1). Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayai (Pasal 2).

Pembiayaan berkaitan erat dengan pemerataan pendidikan dan perluasan akses, karena hal tersebut merupakan salah satu agenda pendidikan, disamping pengupayaan peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan untuk seluruh jenjang pendidikan. Ada beberapa faktor utama yang menyebabkan belum tercapainya pemerataan pendidikan, yaitu: (Bappenas, dalam Elfindri, 2008)

- a. Akses untuk memperoleh pendidikan yang layak belum dapat dirasakan di semua daerah karena tempat tinggal yang jauh dari fasilitas publik, apalagi daerah yang terpencil (seperti di Kecamatan Palupuh dan Kecamatan Palembang dimana penelitian dilakukan oleh Elfindri) .
- b. Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, seperti bangunan sekolah, kelas, bangku dan tenaga pendidik. Kadang-kadang terjadi ketimpangan antara rasio guru dan murid.
- c. Ketimpangan distribusi guru dan ketimpangan kompetensi guru pada seluruh level dan jenjang pendidikan. Artinya pemerataan ketersediaan guru yang berkualitas untuk menjamin tercapainya pemerataan pendidikan.
- d. Beban biaya pendidikan yang harus ditanggung oleh orang tua siswa, seperti biaya transportasi, SPP dan beban lainnya.

Indikator pemerataan dapat dilihat dari Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang telah dicapai oleh suatu daerah, adapun komponennya adalah:

- a. Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) menurut jenjang pendidikan
- b. Angka Partisipasi Kasar menurut jender
- c. Perbandingan Sekolah Antarjenjang Pendidikan dan Rasio Pendidikan Tingkat SD dan SMP
- d. Rasio Pendidikan SMA+MA dan SMK

Analisis Peranan Pemerintah Provinsi dalam Pemerataan Pendidikan Dasar di Provinsi Riau (Sri Maryanti)

- e. Angka Penyerapan Kasar (ASK) TK dan SD, dan Angka Melanjutkan (AMK) ke Tingkat SMP dan SMA
- f. Tingkat Pelayanan Sekolah (YPS) Tingkat SD, SMP dan SMA
- g. Kepadatan Penduduk dan Persentase Desa Terpencil
- h. Hubungan antara Angka Partisipasi dengan Keadaan Sekolah
- i. Hubungan antara Angka Partisipasi dengan Keadaan Daerah
- j. Hubungan antara Angka Melanjutkan (AM) dengan keadaan sekolah dan daerah

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Riau, dengan mengambil beberapa Kabupaten/Kota yakni Kabupaten Rokan Hillir, Kabupaten Indragiri Hulu dan Kota Pekanbaru. Adapun alasan untuk mengambil tiga daerah tersebut didasarkan pada APBD yang tertinggi dan terendah yang ada pada kabupaten/kota tersebut dan mengingat untuk kedepannya ketiga daerah tersebut juga dapat dilakukan untuk pengembangan pendidikan dasar.

Data penelitain ini menggunakan data sekunder yaitu; Data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Riau dan Kabupaten/Kota sampel, Sumber Dana Pendidikan di Provinsi Riau dan Kabupaten/Kota sampel, Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), dan Angka Putus Sekolah (APS). Sedangkan data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Pengumpulan data dilakukan dengan mengkolaborasikan antara data primer dan data sekunder yang kemudian dilakukan dengan dua alat analisis untuk memperoleh kesahihan temuan-temuan (Brannen, 2005). Data ini diperoleh dari instansi-instansi terkait dengan penelitian ini.

Alat Analisis

Analisis data dilakukan dengan Statistik Deskriptif, dalam penganalisaan penulis akan menggunakan tabel, diagram dan grafik berkaitan dengan penmbiayaan penidikan berdasarkan APBD Provinsi, Kabupaten dan Kota. Kontribusi dari pemerintah (Provinsi) dalam pembiayaan pendidikan yang dilihat dari APBD yang dialokasi untuk Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.

Sedangkan analisa kualitatif menggunakan Analisis Komparatif yaitu sebuah alat analisis dengan mengumpulkan data lalu melakukan perbandingan kemudian mendeskripsikannya (Sarwono, 2006), yaitu dengan membandingkan jumlah anggaran untuk pendidikan dasar dan melihat pertumbuhannya di Kabupaten/Kota sampel era otonomi daerah kemudian membuat implikasi kebijakannya. Untuk melihat peran pemerintah Provinsi dalam pemerataan pendidikan dasar maka dalam penelitian ini penulis akan menganalisis jumlah APK, APM dan APS kemudian akan membandingkan dengan jumlah anggaran untuk pendidikan dasar yang ada di kabupaten/kota sampel, kemudian dapat dilihat apakah terjadi ketimpangan atau tidak di kabupaten/kota sampel tersebut, setelah itu penulis akan membuat implikasi kebijakan yang berkaitan dengan peranan pemerintah provinsi dalam pemerataan pendidikan dasar di era otonomi daerah.

HASIL PENELITIAN

Alokasi Dana APBD Untuk Pendidikan di Provinsi, Kabupaten dan Kota

Di sektor pendidikan, pelimpahan kewenangan dan anggaran yang terkait dengan dekonsentrasi dilakukan oleh Depdiknas kepada gubernur yang pelaksanaannya diserahkan oleh gubernur kepada Dinas Pendidikan tingkat provinsi. Sementara itu pelimpahan kewenangan dan anggaran tugas pembantuan dilakukan oleh Depdiknas ke Dinas Pendidikan Provinsi, atau Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau langsung ke tingkat desa. Mengingat sebagian besar kewenangan bidang pendidikan dasar dan menengah telah diserahkan ke daerah, khususnya ke pemerintah Kabupaten/Kota (Pemkab/Pemkot), maka seharusnya penanganan sebagian besar masalah pendidikan termasuk pengalokasian dananya menjadi tanggung jawab Pemkab/Pemkot. Dengan demikian, di masa depan kemajuan pendidikan nasional akan sangat bergantung pada perhatian Pemkab/Pemkot pada sektor pendidikan. Penetapan besarnya anggaran untuk pendidikan dasar sepenuhnya menjadi kewenangan pemda, sehingga variasi antar daerah tidak bisa dihindari, seperti yang terlihat pada Tabel 4.1 dibawah ini:

Tabel 1
Anggaran Belanja Bidang Pendidikan Dasar Berdasarkan APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota Sampel Tahun 2003 – 2007 (000 Rp)

Prov/Kab/Kota	Tahun				
	2003	2004	2005	2006	2007
Prov.Riau	124.797.912	96.421.609	42.003.850	45.561.000	145.226.557
Kota.Pekanbaru	4.868.674	9.449.058	16.031.100	20.031.410	23.316.206
Kab.Rohil	24.187.602	23.310.247	22.212.460	29.356.225	45.527.075
Kab.Inhu	21.600.000	36.900.000	42.500.000	75.200.000	78.500.000

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Dinas Pendidikan dan Olah Raga

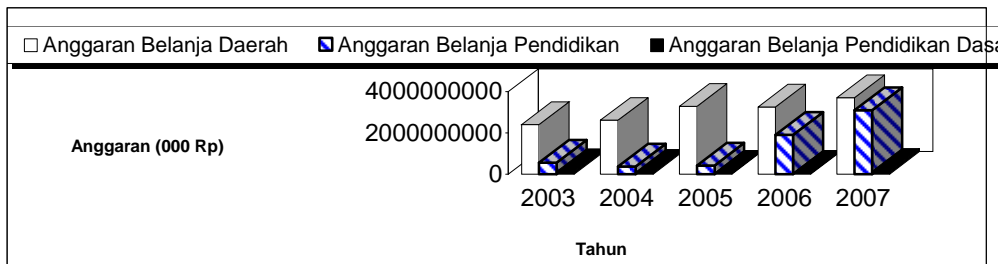
Berdasarkan tabel diatas jumlah anggaran belanja untuk sektor pendidikan dasar berfluktuasi, dimana belanja pendidikan dasar selama tahun 2003-2007 berbanding lurus dengan belanja pendidikan, hal ini menunjukkan bahwa perhatian Pemkab/Pemkot untuk sektor pendidikan khususnya pendidikan dasar cukup besar, hal ini diperkuat oleh adanya PP No 38 Tahun 2007 dimana kewenangan untuk pendidikan dasar berada di kabupaten/kota. Persentase perbandingan anggaran belanja pendidikan dasar terhadap anggaran belanja pendidikan di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota selama tahun 2003-2007 terus mengalami fluktuasi yang turun sampai 5% untuk tingkat provinsi dan Kota Pekanbaru. Tingkat kabupaten juga mengalami penurunan dari 34% menjadi 18% untuk Kabupaten Rokan Hilir dan 149% menjadi 54% untuk Kabupaten Indragiri Hulu. Rata-rata perbandingan antara anggaran pendidikan dasar terhadap anggaran belanja daerah selama tahun 2003-2007 juga bervariasi seperti di Provinsi Riau berjumlah 3,09% di tingkat Kabupaten/Kota sampel yang rata-ratanya mencapai 2,54% untuk Kota Pekanbaru dan Kabupaten Rokan Hilir mencapai 3,41% Kabupaten Indragiri Hulu 18,03%, variasi tersebut disebabkan oleh ada beberapa daerah yang memiliki anggaran belanja pendidikan dasar dan anggaran belanja yang juga bervariasi. Terjadinya fluktuasi tersebut disebabkan oleh tingkat kebutuhan dalam pembiayaan pendidikan khususnya pendidikan dasar yang tiap tahunnya juga mengalami perubahan.

PEMBAHASAN

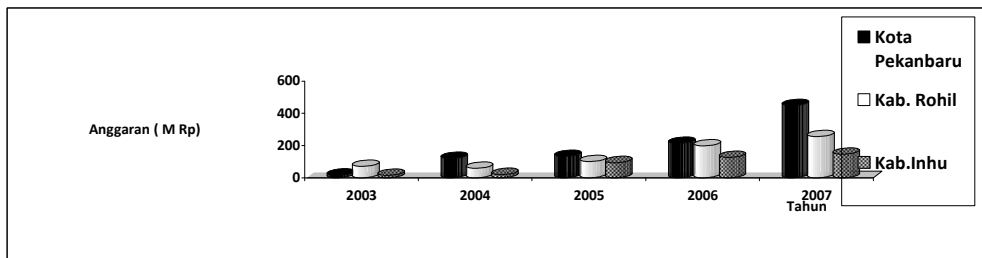
Peranan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota Berdasarkan Pengeluaran Daerah untuk Pendidikan Dasar

Peranan pemerintah diperlihatkan dari seberapa besar subsidi yang diberikan kepada anak-anak sekolah. Peranan itu dapat juga dinyatakan dengan angka yang menunjukkan seberapa besar persentase pembiayaan pendidikan yang berasal dari pendapatan domestik setiap tahunnya (Elfindri, 2001). Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah semakin besar pula pengeluaran yang bersangkutan, seperti yang terlihat pada Grafik 1.

Peran pemerintah provinsi dalam pembiayaan pendidikan dasar dapat dilihat dari anggaran belanja bidang pendidikan dasar, selama tahun 2003-2007 anggaran untuk pendidikan dasar mengalami fluktuasi yang pada tahun 2007 menunjukkan peningkatan. Adanya fluktuasi anggaran pendidikan dasar menurut Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Drs. H. Moch.Wardan,MP karena adanya upaya pemerintah provinsi untuk memenuhi target belanja pendidikan sebesar 20%, di samping itu adanya perubahan tingkat kebutuhan pembiayaan pendidikan dasar di Provinsi Riau. Dapat disimpulkan bahwa peranan pemerintah provinsi dalam pembiayaan pendidikan dasar di kabupaten/kota di Provinsi Riau era otonomi daerah menunjukkan peningkatan, hal ini diperkuat dengan jumlah dana yang bersumber dari APBD Provinsi untuk pembangunan pendidikan di kabupaten/kota sampel yang cenderung meningkat.



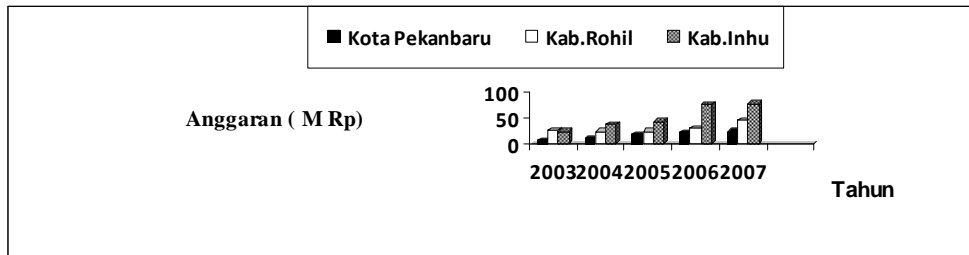
Gambar 1
Realisasi Pengeluaran Pemerintah Provinsi Tahun 2003-2007



Gambar 2
Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten/Kota Untuk Belanja Pendidikan Tahun 2003-2007

Peran pemerintah kabupaten Rokan Hilir meningkat, sedangkan peran dari pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu cenderung meningkat dan demikian pula untuk Kota Pekanbaru, namun secara keseluruhan peran dari pemerintah kabupaten/kota dalam pembiayaan pendidikan menunjukkan peningkatan, hal ini berarti perhatian

pemerintah kabupaten/kota untuk sektor pendidikan cukup besar. Untuk sektor pendidikan dasar, jumlah anggaran yang dialokasikan untuk belanja pendidikan dasar di era otonomi daerah dari tahun 2003-2007 menunjukkan peningkatan, hal ini membuktikan bahwa peran pemerintah kabupaten/kota dalam pembiayaan pendidikan dasar menunjukkan peningkatan yang berarti. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram berikut ini.



Gambar 3
Jumlah Anggaran Belanja untuk Pendidikan Dasar
di Kabupaten/Kota Sampel Tahun 2003-2007

Dapat disimpulkan bahwa peranan pemerintah Kabupaten/Kota dalam pembiayaan pendidikan dasar di kabupaten/kota di Provinsi Riau di era otonomi daerah mengalami peningkatan, hal ini diperkuat dengan jumlah dana yang bersumber dari APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten/Kota untuk pembangunan pendidikan di kabupaten/kota sampel yang cenderung meningkat begitu pula jumlah anggaran untuk belanja pendidikan dasar di kabupaten/kota sampel yang mengalami peningkatan.

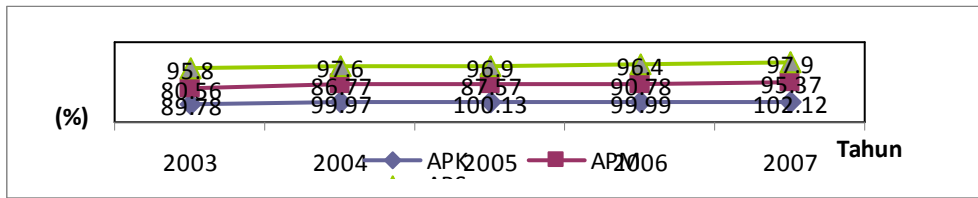
Peranan Pemerintah Provinsi dalam Pemerataan Pendidikan di Kabupaten/Kota Provinsi Riau

Masalah pemerataan pendidikan adalah persoalan bagaimana sistem pendidikan dapat menyediakan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh warga untuk memperoleh pendidikan, sehingga pendidikan itu menjadi wahana bagi pembangunan sumber daya manusia untuk menunjang pembangunan (Umar, *et.all*, 2005). Untuk menganalisis peran pemerintah provinsi/kabupaten/kota dalam pemerataan pendidikan di Provinsi Riau dapat dilihat dari beberapa indikator seperti Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Drop Out (DO), dan angka melanjutkan ke jenjang SMA/MA. Menurut Elfindri (2001), bahwa pemerataan pendidikan dapat dilihat dari ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan seperti bangunan sekolah, kelas, bangku dan tenaga pendidik. Kadang-kadang terjadi ketimpangan antara rasio guru dan murid, disamping itu pemerataan pendidikan serta nilai APK, APM dan APS hal ini juga tertuang dalam Propenas tahun 2004 dan Standar Pelayanan Minimum Pendidikan.

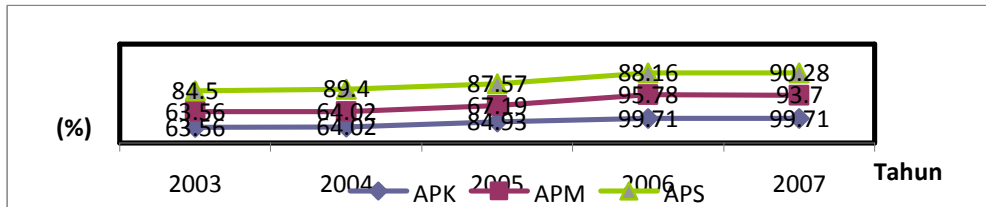
Pemerataan Pendidikan Di Tingkat Provinsi

Dari grafik dibawah ini menunjukkan bahwa secara umum APS, APK dan APM untuk pendidikan dasar dan menengah menunjukkan peningkatan dengan meningkatnya jumlah belanja pendidikan di Provinsi Riau selama tahun 2003-2007 dan diiringi dengan peningkatan APK, APM dan APS menunjukkan bahwa upaya pemerintah provinsi dalam meningkatkan pemerataan pendidikan di Provinsi Riau cukup besar.

Analisis Peranan Pemerintah Provinsi dalam Pemerataan Pendidikan Dasar di Provinsi Riau (Sri Maryanti)



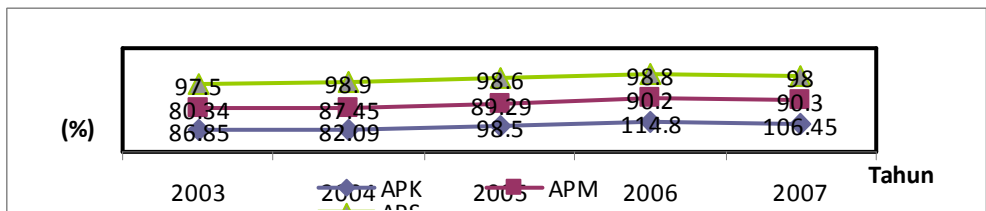
Gambar 4
APK, APM dan APS Untuk Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar di Provinsi Riau Tahun 2003-2007



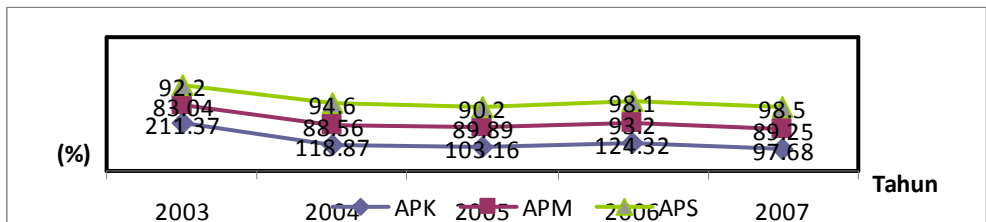
Gambar 5
APK, APM dan APS untuk Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Provinsi Riau Tahun 2003-2007

Pemerataan Pendidikan Di Tingkat Kabupaten/Kota Sampel

Pemerataan pendidikan di tingkat Kabupaten/Kota dapat dilihat dari besarnya jumlah APBD untuk pengeluaran pendidikan dan juga seiring dengan perbaikan dibidang pendidikan. Hal ini dapat ditunjukkan dengan tingkat APK, APM dan APS untuk tingkat SD, SMP dan SMA.



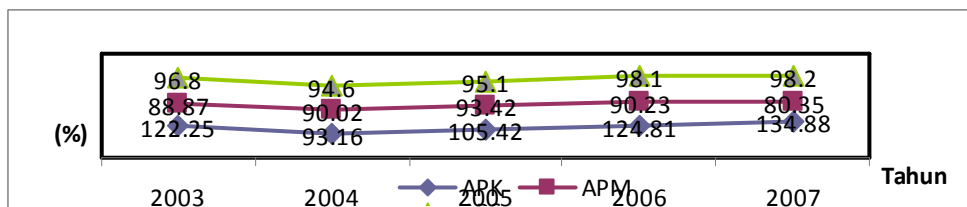
Gambar 6
APK, APM dan APS Untuk Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar di Kota Pekanbaru Tahun 2003-2007



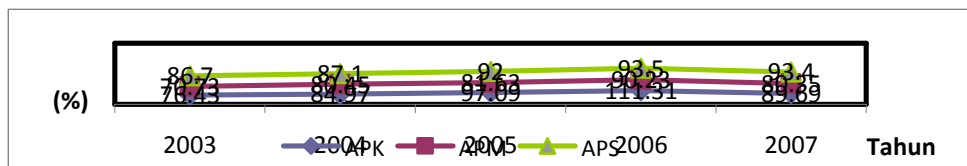
Gambar 7
APK, APM dan APS Untuk Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Kota Pekanbaru Tahun 2003-2007

APK, APM dan APS untuk SD dan SMP di Kota Pekanbaru menunjukkan peningkatan hal ini menunjukkan bahwa jumlah anak yang telah bersekolah pada jenjang pendidikannya sesuai dengan kelompok usia mereka dan kemampuan

sekolah dalam menampung ereka yang berusia sekola meningkat. Demikian pula di Kabupaten Rokan Hilir APK, APM dan APS untuk tingkat SD dan SMP menunjukkan, seperti yang terlihat pada grafik berikut ini:

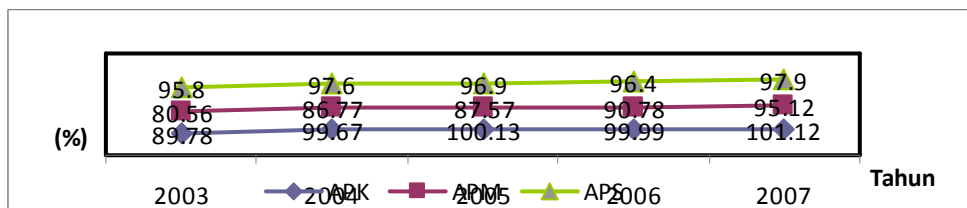


Gambar 8
APK, APM dan APS Pendidikan Dasar di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2003-2007

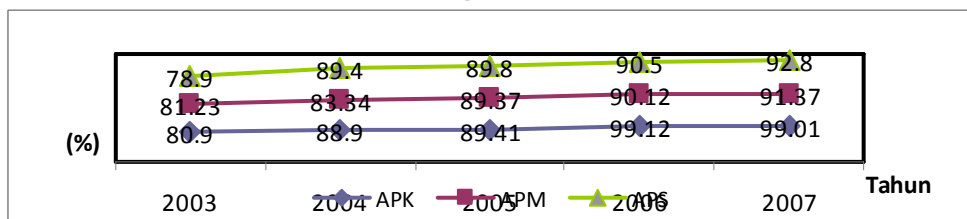


Gambar 9
APK, APM dan APS Pendidikan Dasar di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2003-2007

Di Kabupaten Indragiri Hulu APS, APM dan APK selama tahun 2003-2007 untuk jejang pendidikan SD dan SMP mengalami peningkatan berarti bahwa kemampuan sekolah untuk menampung penduduk yang bersekolah semakin meningkat, seperti yang digambarkan grafik dibawah ini:



Gambar 10
APK, APM dan APS Untuk Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2003-2007



Gambar 11
APK, APM dan APS Untuk Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2003-2007

Dapat disimpulkan bahwa terjadi pemerataan pendidikan di Kabupaten/Kota Provinsi Riau artinya ada peran dari Pemerintah Provinsi Riau dalam pemerataan pendidikan di kabupaten/kota sampel. Hal ini diperkuat dengan semakin besar potensi ekonomi yang dimiliki suatu daerah maka belanja provinsi untuk pendidikan

Analisis Peranan Pemerintah Provinsi dalam Pemerataan Pendidikan Dasar di Provinsi Riau (Sri Maryanti)

semakin berkurang, dan sebaliknya semakin kecil potensi ekonomi suatu daerah maka belanja provinsi untuk pendidikan semakin meningkat.

KESIMPULAN

Perhatian pemerintah kabupaten/kota untuk pendidikan dasar masih besar, terlihat dari jumlah rasio rata-rata antara belanja pendidikan dasar terhadap belanja pendidikan di Kota Pekanbaru 13,16% untuk Kabupaten Rokan Hilir rata-rata 25,75% dan Kabupaten Indragiri Hulu rata-rata 70% lebih. Namun tidak demikian dengan rasio antara anggaran belanja bidang pendidikan dasar terhadap belanja pendidikan di Provinsi Riau yang menurun dari 22,82% tahun 2003 menjadi 4,60% tahun 2007, dengan rasio rata-rata 13,08%.

Peran pemerintah provinsi dalam pemerataan pendidikan di kabupaten/kota dilihat dari semakin besar potensi ekonomi yang dimiliki suatu daerah maka belanja provinsi untuk pendidikan akan berkurang. Sebaliknya semakin kecil potensi ekonomi suatu daerah maka belanja provinsi untuk pendidikan semakin meningkat. Di Kabupaten Rokan Hilir yang memiliki potensi ekonomi besar dengan jumlah APBD Perkapita meningkat dari Rp. 1.573,54 tahun 2003 menjadi Rp. 3.351,40 tahun 2007, belanja provinsi untuk pendidikan perkapita berkurang dari Rp. 5.491,53 di tahun 2003 menjadi Rp.2.607,79 di tahun 2007. Di Kabupaten Indragiri Hulu yang memiliki potensi ekonomi kecil dengan jumlah APBD Perkapita meningkat dari Rp. 318,07 tahun 2003 menjadi Rp. 1.232,70 tahun 2007, belanja provinsi untuk pendidikan perkapita berkurang dari Rp. 8.832,69 tahun 2003 menjadi Rp. 4.420,79 tahun 2007. Namun belanja provinsi untuk pendidikan perkapita di Kabupaten Indragiri Hulu lebih besar dibanding dengan di Kabupaten Rokan Hilir. Untuk Kota Pekanbaru dengan APBD perkapita yang meningkat dari Rp. 552,35 tahun 2003 menjadi Rp. 1.184,09 tahun 2007, jumlah belanja provinsi untuk pendidikan meningkat dari Rp. 3.930,81 tahun 2003 menjadi Rp. 18.812,73 tahun 2007.

DAFTAR PUSTAKA

- Center for the Study of Living standards,2001, *Discussion Paper on Health and education human Capital Indicators*. Center for the Study of Living Standars, Ottawa, Februari
- Education Statistic Bulletin. 1999, *The Return on Investment in Education*, Education Statistic Bulletin No.8,Februari,1999,Quebec.
- Elfindri, 2001,Ekonomi Sumber Daya Manusia,Universitas Andalas, Padang
- Elfindri, 2008.Strategi Sukses Membangun Daerah, Gorga Media
- Jonathan, 2006. Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta
- Julia Brannen,2005. Memadu Metode Peneltian Kualitatif dan Kuantitatif, Penerbit Fakultas IAIN Antasari Samarinda dan Pustaka Pelajar,Yogyakarta
- Propenas 2000-2004, Undang-undang No.25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional 2000-2004, Sinar Grafika,Jakarta,2003.